

**EFEKTIVITAS DAN KELAYAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN DASAR DI
KABUPATEN MESUJI**

(Tesis)

Oleh

TIYAS APRIZA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**EFEKTIVITAS DAN KELAYAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN DASAR DI
KABUPATEN MESUJI**

Oleh
TIYAS APRIZA

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS DAN KELAYAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN MESUJI

Oleh

TIYAS APRIZA

Kabupaten Mesuji berada dalam kondisi terendah terkait partisipasi pendidikan dasar melalui angka partisipasi sekolah (APS) Tahun 2020 sekolah dasar (SD) 99,26% sekolah menengah pertama (SMP) 89,36%. Pada konsep desentralisasi pendidikan di uraikan menjadi dua jenis desentralisasi kewenangan dalam hal kebijakan dan pendanaan serta desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan yang lebih besar pada sekolah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis efektivitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji. dengan menggunakan teori efektivitas menurut Muasaroh (2010:13) yaitu (1) aspek tugas dan fungsi (2) aspek rencana dan program (3) aspek ketentuan dan program (4) aspek tujuan dan kondisi ideal serta tipologi kewenangan pendidikan yang dapat di desentralisasikan (1) organisasi dan proses belajar mengajar (2) manajemen guru (3) struktur dan perencanaan (4) sumber daya. metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti bermaksud untuk menganalisis, menemukan, memahami dan menjelaskan tentang desentralisasi pendidikan pada partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji. Hasil penelitian ini menjelaskan aspek efektivitas cenderung lemah pada aspek rencana dan program karena bannyak program yang tidak di realisasikan dan aspek tujuan dan kondisi ideal kualifikasi tenaga pendidikan berlatar belakang lulusan SMA dan masyarakat yang tidak memiliki ijazah 21,10%. Pada aspek tipologi kewenangan yang di desentralisasikan komponen manajemen guru masih minim kegiatan peningkatan kapasitas, struktur dan perencanaan tidak memiliki program secara rutin. Pada unit sekolah terkait pendidikan serta sumber daya pemanfaatan bantuan operasional ternyata tidak meningkatkan minat masyarakat. Sehingga penerapan desentralisasi pendidikan di kabupaten mesuji belum layak untuk di terapkan.

Kata Kunci: Efektivitas Kelayakan, Desentralisasi Pendidikan, Pendidikan Dasar

ABSTRACT

FEASIBILITY AND EFFECTIVENESS OF EDUCATION DECENTRALIZATION IN INCREASING PARTICIPATION OF BASIC EDUCATION IN MESUJI DISTRICT

By

Tiyas Apriza

Mesuji Regency is in the lowest condition related to basic education participation through the school enrollment rate (APS) In 2020 elementary school (ES) 99.26% junior high school (JHC) 89.36%. In the concept of decentralization of education, it is described into two types of decentralization of authority in terms of policy and funding and decentralization of education gives greater authority to schools. This study aims to determine and analyze the effectiveness of education decentralization in improving basic education in Mesuji Regency. by using the theory of effectiveness according to Muasaroh (2010:13), namely (1) aspects of tasks and functions (2) aspects of plans and programs (3) aspects of provisions and programs (4) aspects of goals and ideal conditions and typology of decentralized educational authority (1) organization and teaching and learning process (2) teacher management (3) structure and planning (4) resources. This research method is descriptive research with a qualitative approach. The researcher intends to analyze, find, understand and explain about the decentralization of education in basic education participation in Mesuji Regency. The results of this study explain that the effectiveness aspect tends to be weak in terms of provisions and regulations through the analysis of the absence of regulations related to the implementation of education in Mesuji Regency and aspects of the objectives and ideal conditions of qualification for education personnel with high school graduates and people who do not have a diploma 21.10%. In the aspect of the typology of authority, which is decentralized, the teacher management component still lacks capacity building, structure and planning activities and does not have a program on a regular basis. In school units related to education and the use of operational assistance resources did not increase public interest. So that the implementation of education decentralization in Mesuji Regency is not yet feasible to be implemented.

Keywords: Feasibility Effectiveness, Education Decentralization, Basic Education

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS DAN KELAYAKAN
DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
MESUJI**

Nama Mahasiswa : **TIYAS APRIZA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1926021011


Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. Komisi Pembimbing


Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P
NIP 19780430 200812 1 001


Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP. 19690219 199403 2 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

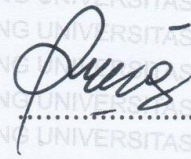
Ketua : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.



Penguji Utama : Dr. Syarief Makhya

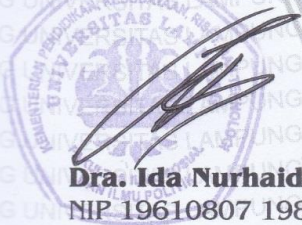


Sekretaris : Dr. Feni Rosalia, M.Si.



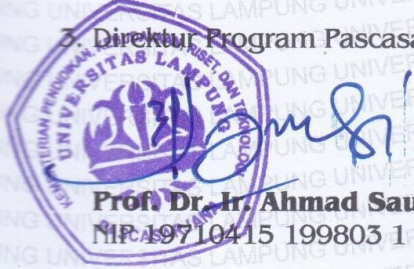
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.19610807 198703 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP.19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 19 April 2022



PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 Juni 2022

Penulis,



TIYAS APRIZA
NPM. 1926021011

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Tiyas Apriza, Tempat Tanggal Lahir Tanggamus pada 27 April 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Sungkono dan ibunda Muhaiyarah, S.Pd. memiliki seorang kakak laki-laki bernama Hadi Prianto, Amd dan kakak perempuan bernama Dwi Pratiwi, S.Pd.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Tahun 2001-2007 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Setelah lulus SD penulis menempuh pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Model Talang Padang Tahun 2007-2010. Melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Pringsewu tahun 2010-2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2013-2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan kembali sebagai mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan lulus pada 19 April 2022.

Aktivitas penulis aktif sebagai peneliti pada lembaga riset Citra Research Center sebagai Direktur dalam mengelola riset opini publik yang berkaitan dengan kebijakan, pemilihan dan dinamika politik. Selain itu penulis juga aktif membantu kegiatan dosen jurusan ilmu pemerintahan sebagai bentuk pengabdian pada guru sekaligus orang tua di kampus.

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Q.S AL Mujadalah: 11)

“Hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda tanya tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar.

Terimalah dan hadapilah”.

(Soe Hok Gie)

“Kemauan adalah bentuk keberadaan bahwa kamu ada dan hidup, maka lakukan usaha tanpa berhenti”

(Penulis)

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Tesis yang berjudul “**Efektivitas dan Kelayakan Desentralisasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Dasar di Kabupaten Mesuji**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain teman – teman Magister Ilmu Pemerintahan. Semoga Allah selalu memberkahi kalian.

Kedua Orang Tua, Ibunda ku Muhaiyarah perempuan luar biasa yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk keluarga. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang mampu menggantikanmu. Terima kasih untuk setiap cinta dan kasih sayang yang telah ibu curahkan kepada kami. Ayahku Sungkono sosok kepala rumah tangga yang sabar, tekun dan pekerja keras terima kasih telah menjaga, melindungi keluarga ini seutuhnya.

Kedua Kakak ku, Mas Hadi Prianto dan Dwi Pratiwi terima kasih untuk dukungan dan kasih sayang serta doa untuk ku.

Serta Abang-abang dan Teman-teman ku, Dedi Hermawan, Darmawan Purba, Yahnu Wiguno Sanyoto, Eko Marstiawan, M. Hafiz, Robby Ruyudha, Irfan Zamzami, Rizki Hendarji, Anam Alamsyah, Zaimasuri, Agus Burman, Andi Sanjaya dan Dhea Vita Lestari (insyaallah teman hidup).

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P. selaku pembimbing utama yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi tersusunnya tesis ini;
6. Bapak Dr. Feni Rosalia, M.Si. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini;
7. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen dan Staff Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
9. Seluruh informan;
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2019;
11. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,

TIYAS APRIZA
NPM 1926021011

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Tentang Efektivitas	16
2.2 Tinjauan Tentang Desentralisasi	19
2.3 Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan	21
2.4 Angka Partisipasi Sekolah	23
2.5 Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Informan	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Pengolahan Data	38
3.8 Teknik Analisis Data	38
3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39
IV. GAMBARAN UMUM	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mesuji	41
4.1.1 Geografis	41
4.1.2 Penduduk	42
4.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji	44
4.2.1 Visi dan Misi	46
4.2.2 Tujuan Sasaran dan Strategi	46

4.2.3 Struktur Organisasi	50
4.2.4 Sumber Daya Manusia.....	52
4.2.5 Sarana dan Prasarana	52

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan Aspek Efektivitas.....	54
5.1.1 Aspek Tugas dan Fungsi.....	55
5.1.2 Aspek Rencana dan Program.....	61
5.1.3 Aspek Ketentuan dan Peraturan	68
5.1.4 Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal	70
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Aspek Tipologi Kewenangan Pendidikan yang di Desentralisasikan.....	75
5.2.1 Organisasi dan Proses Belajar Mengajar	75
5.2.2 Manajemen Guru	82
5.2.3 Struktur dan Perencanaan	85
5.2.4 Sumber Daya	89

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	95
6.2 Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah Pusat kepada daerah berdasarkan asas otonom. Sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan-urusannya.

Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sistem Pendidikan nasional telah mengalami tiga kali perubahan sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, dan undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Selama waktu tersebut telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan, baik dari aspek substansi maupun kekuasaan dan kewenangan penyelenggaranya. Dari aspek substansi, telah terjadi perubahan dan perkembangan, antara lain tentang tujuan pendidikan, kurikulum, metode mengajar dan penilaian pendidikan yang terus berlangsung. Pada perubahan sistem pendidikan nasional yang mulanya sentralistik kini menjadi sistem pendidikan nasional yang mengalami desentralisasi. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem desentralisasi yang pada hakikatnya desentralisasi adalah hak otonomisasi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu. Pemerintah daerah dianggap

dapat lebih memahami keinginan penduduk lokal sehingga pengambilan keputusan dalam penyediaan pelayanan lebih responsif terhadap permintaan masyarakat (Utomo, 2008).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan meletakkan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, aman, dan demokratis sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Otonomi daerah diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan pada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah merupakan ukuran kualitas kinerja yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan di tengah masyarakat. Dalam UUD 1945 Pasal 31 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan sehat. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan kewenangannya untuk mengatur urusan wajibnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atas azas Desentralisasi mengenai urusan wajib yaitu pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan sosial dan pembangunan.

Desentralisasi pendidikan secara umum dapat dikatakan telah menjadi fenomena global selama dua puluh lima tahun di negara berkembang di

Amerika Latin dan Eropa Timur. Desentralisasi Pendidikan di Indonesia dimaksudkan untuk perubahan paradigma manajemen pendidikan dari Sentralistik ke arah Desentralistik agar mampu meretas persoalan ekonomi, mutu pendidikan dan perubahan sosial. Mengacu kepada tiga konsep Desentralisasi Pendidikan yaitu. *Pertama* Desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan, dengan terwujudnya pemerintahan daerah yang otonom dalam pengelolaan pendidikan. *Kedua* Desentralisasi pada satuan pendidikan, dengan terwujudnya lembaga atau satuan pendidikan yang mandiri dan profesional. *Ketiga* Desentralisasi pada masyarakat pendidikan, dengan terwujudnya masyarakat yang demokratis dan lembaga yang lebih peduli kepada dunia pendidikan secara mandiri dan profesional. Makna desentralisasi pendidikan tersebut menuju pengelolaan pendidikan yang efisien, demokratis dan berkeadilan.

Upaya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan terus digaungkan agar mampu meningkatkan level pendidikan secara merata di seluruh wilayah dan daerah. Melalui program merdeka belajar sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 telah memiliki delapan prioritas merdeka belajar diantaranya, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Digitalisasi Sekolah, Prestasi dan Penguatan Karakter, Guru Penggerak, Kurikulum Baru, Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Kampus Merdeka, Pemajuan Kebudayaan dan Bahasa. Program ini diharapkan mampu dijalankan Pemerintah Daerah dalam urusan desentralisasi pendidik dan juga meretas persoalan pendidikan di seluruh daerah kabupaten/kota secara merata demi memperkuat pondasi pendidikan hingga ke ujung perbatasan daerah.

Selaras bersama program pemerintah pusat pada konteks permasalahan Desentralisasi Pendidikan mengenai kebutuhan daerah banyak dialami sebagian daerah di kabupaten maupun kota seperti masalah ekonomi, mutu pendidikan, perubahan sosial akibat globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dinamika politik. Kemudian tuntutan pemerintah pusat agar tingkat pendidikan meningkat dan merata dengan

keterbatasan sumber anggaran pendidikan mengakibatkan terhambatnya pembangunan dibidang pendidikan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merealisasikan program pemerintah khususnya di bidang pendidikan (Pasandaran, 2017).

Seiring dengan berlakunya otonomi pendidikan di suatu daerah, maka setiap daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur urusan pendidikan dan juga memiliki otoritas penuh untuk mengoptimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada. Otonomi pendidikan juga merupakan momentum tepat bagi setiap sekolah untuk menerapkan strategi-strategi yang dimiliki oleh setiap sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dalam proses pembelajaran melalui peningkatan produktivitas, keefektivitasan dan efisiensi. Pada praktiknya pengelola sekolah perlu melibatkan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran.

Menurut Dreher (2006:11) bahwa faktor permintaan dan penawaran yang sangat mempengaruhi APS (Angka Partisipasi Sekolah) beberapa faktor permintaan meliputi (1) pendapatan per kapita (kesejahteraan rumah tangga), (2) Tingkat melek huruf usia dewasa (pendidikan orang tua), (3) Jumlah sekolah dan tingkat urbanisasi penduduk. Sedangkan dari faktor penawaran yaitu (1) Rasio guru terhadap murid, (2) Biaya pendidikan, (3) Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Kaitan melalui desentralisasi pada pendidikan difungsikan melalui organisasi perangkat daerah khususnya di bidang pendidikan yang memiliki wewenang menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkatan kabupaten.

Sekolah yang efektif melalui proses perbaikan yang kontinu dan pembagian tanggung jawab merupakan fokus utama yang ingin dicapai dari penerapan desentralisasi pendidikan, sehingga apabila prinsip tersebut benar-benar diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi strategi efektif untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari

desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah sebuah proses yang kompleks dan dapat membawa perubahan-perubahan penting tentang cara sistem pendidikan menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, dan mengelola sekolah-sekolah.

Pendidikan sangat penting bagi pembangunan ekonomi, sebagai sistem sarana pendidikan merupakan wahana untuk memperkuat pengaruh-pengaruh politik serta menjalankan program dan tujuan para penguasa. Sukses atau gagalnya upaya desentralisasi di bidang pendidikan sering kali lebih ditentukan oleh alasan-alasan politis dari pada rancangan teknis. Program-program desentralisasi sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Sehubungan dengan hal itu, dalam pengertian ini, persoalan desentralisasi melibatkan unsur pendidikan (dalam pengertian pendidikan) itu sendiri, tetapi juga unsur-unsur administratif dan finansial. Selain itu, pendidikan menjadi dasar atas segala perubahan dibidang ekonomi dan politik faktor yang mempengaruhi yaitu pertama Lingkungan dan status sosial lingkungan yang mempengaruhi antara lain kondisi masyarakat yang rentan rendah kondisi perekonomian mengakibatkan minimnya minat untuk menempuh pendidikan secara formal dengan asumsi bahwa biaya menempuh pendidikan sangat tinggi sehingga lebih baik di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari misal seperti kebutuhan pokok pangan. Kemudian urusan politik menjadi bagian yang semu dan juga aktivitas yang tidak menarik dikarenakan masyarakat minim terhadap pendidikan politik sehingga tidak menyadari kondisi geopolitik dan kebijakan politik dilingkungan sekitarnya. kebijakan politis, maka semua upaya untuk mengubah kebijakan dan berbagai hal yang terkait dengan pendidikan diperlukan upaya melalui jalur politis.

Ketika menyepakati gagasan yang mengusulkan bahwa perancangan pendidikan seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik individual maupun kelompok, maka pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah pemerintah, penyelenggara

sekolah, guru, dosen, orang tua dan berbagai asosiasi profesional di bidang pendidikan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok agama (Djumali, 2014). Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah, dengan mengacu kepada masukan dari semua yang disebutkan di atas, hanya merangkai kerangka dasar. Pemerintah bisa menetapkan tujuan umum dan menyiapkan sumber-sumber daya di bidang pendidikan, tetapi pengelolaan dari hari ke hari diserahkan ke otoritas yang lebih rendah, bahkan ke sekolah-sekolah.

Sekolahpun harus mendengarkan masukan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Masukan ini lalu menjadi bagian dari sistem pendidikan yang lebih luas, sehingga pada akhirnya pendidikan tumbuh sebagai proses dialektika antara sistem dan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tersebut dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan tingkat daerah digagas agar daerah mampu meningkatkan potensi sumber daya manusia agar tingkat pendidikan dapat meningkat dan mendorong kualitas unggul masyarakat dengan desentralisasi pendidikan atau *Decentralized Basic Education Project* (DBEP).

Melihat kondisi pendidikan di Provinsi Lampung belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang baik masih terdapat beberapa daerah berada dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) masih rendah di antaranya Kabupaten Mesuji yang setiap tahunnya meningkat namun persentasenya masih sedikit dalam peningkatan tiga tahun terakhir sejak tahun 2017 yaitu 61,87 kemudian di tahun 2018 yaitu 62,88 dan pada tahun 2019 berada di angka 63,63% termasuk masih terendah di Provinsi Lampung.¹ Hal ini mendorong Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji berupaya meningkatkan IPM kategori pendidikan agar masyarakat Kabupaten Mesuji berada dalam kondisi yang maju dalam level pendidikannya. Kemudian angka

¹ <https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/1881> diakses tanggal 23 juli 2021 pukul 08.00 wib

partisipasi sekolah (APS) pada tahun 2018-2020 Provinsi Lampung mencapai sebagai berikut :

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Lampung (2018-2020)

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS)								
	SD			SMP			SMA		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Lampung	99,86	99,80	99,74	95,00	94,89	95,24	70,83	71,05	71,34

(Sumber: BPS Provinsi Lampung)

Berdasarkan persentasi diatas maka dapat diketahui sebaran minat masyarakat untuk menempuh pendidikan wajib selama dua belas tahun di seluruh kabupaten/kota belum sepenuhnya menjadi prioritas bagi masyarakat di Provinsi Lampung pada tingkatan sekolah dasar di tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan. Sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama di tahun 2018 sampai 2020 mengalami fluktuasi hal ini menjadi catatan penting terkait minat masyarakat dan juga memahami persoalan sosialnya. Kemudian pada jenjang sekolah menengah atas mengalami peningkatan di setiap tahunnya sejak tahun 2018 sampai 2020 namun persentase ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi dikarenakan hanya mencapai 70% lebih sedikit, dan perlu memiliki target hingga 80% untuk Provinsi Lampung.

Tabel 1.2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung (2020)

No	Kabupaten/ Kota	% (SD)	% (SMP)	% (SMA)
1.	Lampung Selatan	99,80	93,42	75,90
2.	Lampung Barat	100	95,25	69,29
3.	Pesawaran	100	96,08	71,88
4.	Pringsewu	99,62	98,68	74,08
5.	Lampung Timur	99,80	94,61	66,58
6.	Lampung Tengah	99,74	96,43	68,56
7.	Way Kanan	99,82	96,31	67,70
8.	Tulang Bawang Barat	99,67	93,18	74,44
9.	Lampung Utara	99,84	94,78	72,41
10.	Tulang Bawang	99,73	94,23	68,85
11.	Bandar Lampung	99,98	98,24	76,86
12.	Metro	99,90	95,31	84,09
13.	Mesuji	99,26	89,36	64,15
14.	Tanggamus	99,56	90,95	72,02
15.	Pesisir Barat	99,80	86,73	65,85

(Sumber: BPS Provinsi Lampung)

Seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, cenderung menurun. Pada jenjang SMA/ sederajat ke atas misalnya, kabupaten/kota berkisar antara 64-84 persen. Hasil angka partisipasi sekolah di Provinsi Lampung tahun 2019 dapat dilihat bahwa Kabupaten Mesuji berada dalam persentase terendah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan di daerah kota, APS relatif lebih tinggi di Kota Metro mencapai 84 persen sementara di Kota Bandar Lampung hampir 77 persen. Banyak faktor yang menjadi penyebab atau mempengaruhi anak berhenti sekolah khususnya pada umur 16-18 tahun (SMA) di Provinsi Lampung. Beberapa diantaranya Kabupaten yang baru seperti Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat dan Mesuji berada dalam tingkat pendidikan yang masih rendah dengan data menunjukkan pada tahun 2020 berada dalam tingkatan terendah di bawah 21% putus sekolah. Oleh karena itu dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan pendidikan perlu memperhatikan sekolah sebagai tempat menempuh pendidikan dan didukung melalui sarana prasarana penunjang pendidikan di setiap wilayah agar pendidikan terfasilitasi dengan baik. Berikut jumlah sekolah yang tersedia di Kabuapten Mesuji antara lain.

Tabel 1.3 Jumlah Sekolah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		
		SD	SMP	SMA
		2019/2020	2019/2020	2019/2020
1	Way Serdang	29	11	2
2	Simpang Pematang	16	8	3
3	Panca Jaya	11	3	1
4	Tanjung Raya	23	9	2
5	Mesuji	16	6	3
6	Mesuji Timur	23	8	2
7	Rawajitu Utara	16	4	1
Total		134	49	14

(Sumber. BPS Kabupaten Mesuji Tahun 2020)

Berdasarkan jumlah sekolah di atas mulai dari tingkatan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas masih perlu untuk ditingkatkan ketersediaan jumlah sekolah menyesuaikan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan hingga desa di bagian perbatasan dan juga ketersediaan tenaga pengajar perlu di perhatikan agar setiap sekolah terpenuhi kuantitas guru berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Berdasarkan hasil pengamatan eksplorasi data, dapat teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat pendidikan di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Mesuji. Antara lain ketidakmampuan ekonomi rumah tangga, aksesibilitas sarana pendidikan, pendidikan orang tua, kualitas guru, dan lainnya.

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Mesuji relatif masih rendah. Hal ini didasarkan data tahun 2019/2020 kurang lebih 20 % penduduknya hanya tamat SD. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terutama ada pandangan di masyarakat bahwa pendidikan tidak begitu penting (Renstra Dikbud Mesuji, 2020:19). Di samping itu juga tampaknya para elit non politik dan *stakeholders* lainnya di sejumlah wilayah kurang begitu peduli dalam berpartisipasi untuk pengembangan dan sarana prasarana sekolah. Hal itu disebabkan oleh anggapan masyarakat dan sejumlah elit non pendidikan sebagai urusan pemerintah daerah semata terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 1.4 Jumlah Fasilitas Sekolah Kecamatan di Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kecamatan								
		SD			SMP			SMA		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Way Serdang	20	20	20	11	11	11	2	2	2
2	Simpang Pematang	13	13	13	9	6	6	2	2	2
3	Panca Jaya	7	7	7	3	3	3	1	1	1
4	Tanjung Raya	19	20	20	10	8	8	3	3	3
5	Mesuji	10	10	11	7	6	6	3	3	3
6	Mesuji Timur	20	20	20	10	7	6	6	2	2
7	Rawajitu Utara	13	13	13	5	3	2	2	1	1

(Sumber. BPS Kabupaten Mesuji Tahun 2020)

Ketersediaan sarana prasarana sebagai penunjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting di era pembangunan ini. Dalam persetase di atas dapat diketahui sarana pendukung pendidikan belum tersedia dengan baik dan sangat sedikit kenaikan jumlah fasilitas di masing-masing kecamatan. seperti Panca Jaya, Tanjung Raya, Mesuji, Mesuji Timur dan Rawajitu Utara mengalami penurunan jumlah fasilitas tiap tahunnya dengan demikian persoalan ketersediaan sarana prasarana menjadi faktor penghambat peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mesuji.

Terkait sarana prasarana peran masyarakat dan sebagian elit lokal yang masih peduli terhadap perkembangan mutu sekolah. Sebagian besar dari mereka merupakan eksponen gerakan reformasi tingkat nasional dan berimbas juga di Kabupaten Mesuji. Mereka terdiri dari sejumlah eksponen Lembaga Swadaya Masyarakat peduli pendidikan, dan guru. Mereka masih peduli terhadap kemajuan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Mesuji. Namun demikian, ternyata Pemerintah Daerah kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat yang dilakukan oleh para elit lokal di Kabupaten Mesuji. Ada elit (politik) yang menganggap bahwa perkembangan mutu pendidikan di Kabupaten Mesuji cukup ditangani oleh Dinas Pendidikan dan jajarannya, sementara ada sebagian elit yang lain (sebagian elit non politik) menganggap bahwa mutu pendidikan juga merupakan tugasnya termasuk Bupati sebagai *Top Leader* dan elit politik di Kabupaten Mesuji.²

Politik lokal tidak harus selalu dikaitkan dengan perebutan kekuasaan “politik” seperti yang dicitrakan masyarakat pada umumnya. Namun, politik lokal dapat memiliki sumbangan yang positif maupun negatif. Pada penelitian terdahulu melalui Hasil kajian dari Riant Nugroho dapat menjadi contoh sumbangan positif mengenai politik lokal terhadap pendidikan di tingkat kabupaten. Hasil penelitiannya Nugroho (2018) berjudul Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2013-2017, yang berupaya mengkaji

² <https://radarlampung.co.id> diakses tanggal 6 juni 2021 pukul 08.00 wib

mengenai kebijakan aktor lokal pada level kabuapten/pemerintah daerah di wilayah Bali sebagai kabupaten termiskin. Penelitian ini berhasil mengungkap mengenai kebijakan bupati di bidang pendidikan sebagai kebijakan publik sehingga dapat mengangkat kabupaten ini menjadi salah satu pengembang pendidikan (melalui pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mendukung upaya bupati tersebut) di Kawasan Indonesia Timur sebagai kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Melalui penelitian ini juga dapat diungkap bahwa politik lokal sangat mempengaruhi dinamika yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di wilayah Kabupaten Jembrana. Namun demikian, penelitian ini tak membahas mengenai implementasi pada tingkat satuan pendidikan dan mutu sekolah, meskipun membahas mengenai kinerja Komite Sekolah. Penelitian ini berfokus pada suatu pelaksanaan desentralisasi dibidang pendidikan karena merupakan bagian vital urusan Pemerintah Daerah mencakup program dan pelayanan terkait.

Kedua mengenai Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas oleh Nur Ervannudin dan Bimo Wahyu Widodo tahun 2016 menyatakan bahwa dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkanlah yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS Berpotensi menawarkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. MBS Berfungsi untuk menjamin bahwa semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat, tetapi semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada disekolah untuk berinovasi dan berimprovisasi.

Desentralisasi pendidikan menjadikan pejabat dan pelaku di daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri potensinya. Namun demikian banyak hal yang mengikuti dengan perkembangan yang dijalankan ini. Seperti bahaya peluang, tantangan, hambatan serta peran aktif masyarakat untuk menuju pendidikan yang berkualitas peluang ini ditambah dengan diberlakukannya MEA pada tahun 2016 menjadi arena untuk meraih kesuksesan bukan hanya di negara sendiri tetapi meraih sukses pada kancah internasional. Pembahasan pada penelitian ini mengacu pada kesiapan masyarakat dalam menyambut program internasional di Indonesia, seperti MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), Bonus Demografi, dan Globalisasi. Pengorganisasian pendidikan berbasis masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah perencanaan, pengalokasian keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi. Kemudian pengorganisasian dapat dilakukan tahapan yaitu, pembagian tugas, penetapan relasi antar organisasi, penetapan struktur organisasi, pedelegasian wewenang, dan pengorganisasian (penataan organisasi).

Ketiga penelitian Subijanto tahun 2018 dengan judul Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan. Pembahasan pada penelitian ini Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah dalam menentukan berbagai kebijakan, seperti organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber pendanaan sekolah. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas mendukung dengan memberikan kewenangan otonomi pendidikan langsung kepada setiap satuan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah.

Mutu dan relevansi pendidikan ada pada setiap proses pertahapan pada satuan pendidikan. Komitmen pemerintah untuk berinvestasi pada

pendidikan sebagai sebagai solusi masa depan bangsa harus segera diwujudkan melalui pengalokasian 20% APBN untuk pendidikan diluar anggaran pendidikan kedinasan dan gaji guru.untuk memperkuat dukunga pengembangan pendidikan, diperlukan kemitraan yang erat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Untuk lebih meningkatkan daya saing bangsa, unggul bertaraf internasional, dan berkesinambungan di setiap daerah dengan menekankan relevansi dengan kebutuhan, ciri khas/keunggulan lokal.

Melalui penjelasan diatas terkait hubungan efektivitas desentralisasi pendidikan di Kabupaten Mesuji maka pencapaian organisasi semakin besar maka semakin besar pula efektivitasnya berupa kegiatan dan program yang telah direncanakan. Beberapa faktor penghambat peningkatan mutu pendidikan dan juga berdampak pada IPM diantaranya, minat masyarakat untuk menempuh pendidikan rendah dikarenakan pasca sekolah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di daerah tersebut, kondisi perekonomian masyarakat tidak stabil, aksesibilitas ketersediaan sarana prasarana pendukung pendidikan minim dan tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya masih sulit dijangkau serta akses transportasi belum tersedia dengan baik, dinamika elit politik belum stabil. Menurut analisis permasalahan yang di uraikan di atas maka penulis akan meneliti mengenai “Efektivitas dan kelayakan Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Dasar di Kabupaten Mesuji”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas dan kelayakan desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kelayakan desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dalam kajian ilmu pemerintahan, khususnya kajian tentang efektivitas desentralisasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji terkait partisipasi pendidikan dasar. Selain itu Menjadi salah satu sumber bacaan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan mengambil kajian atau topik tentang pelaksanaan desentralisasi pada masa-masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas)

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar terhadap organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah mengenai hubungan arti efektivitas.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Hubungan Efektivitas

Sehubungan dengan gambar di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah di capai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Pernyataan tersebut mendeskripsikan pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang di kehendaki.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering di kaitkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan.

Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula. Pada aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai antara lain:

1. Aspek Tugas atau Fungsi

Yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Aspek Rencana atau Program

Yaitu kemampuan menggagas secara tepat dan menciptakan peluang demi mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Yaitu mampu menjalankan aturan dengan baik yang berhubungan dengan kegiatan secara berkelanjutan.

4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Yaitu kegiatan dikatakan efektif apabila dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

Berdasarkan aspek diatas dapat dipahami bahwa efektifitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Efektifitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

2.2 Tinjauan Tentang Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “de” berarti lepas dan centrum berarti pusat. Menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Desentralisasi dalam arti *self government* menurut Smith dalam Khairul Muluk berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki *self government* melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tertentu. Karena dewan perwakilan rakyat daerah merupakan elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan pendapat (Bachrul Elmi. 2002) menyebutkan, bahwa desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi : urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.

Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut Sunarno menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan penonoman menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu (Sunarno. 2011).

Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik

Indonesia merupakan kebebasan dan kemadirian yang seluasluasnya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang memiliki fungsi atau bidang pekerjaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan demokrasi.

Hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subyek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan (administrasi negara) yang menjadi urusan rumah tangganya. Jadi, hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar federal yaitu hubungan antara dua subyek hukum yang masing-masing berdiri sendiri.

Perbedaannya, dalam otonomi teritorial, pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Pemencaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan. Lebih jauh Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan.

Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. Desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada

golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll.)

2.3 Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi Pendidikan merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya memindahkan penyelenggaraan pendidikan yang semula sentralistik menjadi pendidikan yang sesuai dengan kepentingan daerah atau masyarakat. Paradigma sentralistik pemerintah pusat mendominasi proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi sehingga pusat menjadi pemain utama dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang dilakukan di berbagai negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi keuangan (Burki, 1999:23).

Desentralisasi pendidikan merupakan proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar diberikan pula kepada sekolah dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Konsekuensi logis dalam pelaksanaan desentralisasi berdampak pada berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan yang notabene menyangkut sistem pendidikan nasional. bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020. Menurut Hadiyanto (2004: 30), secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu:

1. Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik).
2. Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif. Beberapa tujuan dari desentralisasi pendidikan menurut (Hanson dalam Hadiyanto, 2004), yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan efisiensi manajemen.
3. Distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan.
4. Meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan.
5. Kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi.
6. Pendidikan berbasis kebutuhan pasar.
7. Menetralisasi pusat-pusat kekuasaan.
8. Meningkatkan kualitas pendidikan.

Kemudian jika melihat topologi komponen-komponen bidang pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk di desentralisasikan melalui hasil pengamatan desentralisasi pendidikan di negara amerika latin yang telah melakukan desentralisasi pendidikan, Patrinos, Harry A. dan David L. Ariasingam 1997 menyimpulkan bahwa di negara-negara yang tergabung

dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* OECD kewenangan-kewenangan dalam hal penentuan buku pelajaran, metode pembelajaran, tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana pengembangan sekolah cenderung berlaku di tingkat sekolah. Adapun tipologi komponen-komponen bidang pendidikan yang dapat di desentralisasikan yaitu:

Tabel 2.1 Tipologi kewenangan pendidikan yang dapat didesentralisasikan

Komponen	Kewenangan
Organisasi dan proses belajar mengajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan sekolah mana yang dapat diikuti peserta didik 2. Waktu belajar disekolah 3. Penentuan buku teks 4. Kurikulum 5. Metode pembelajaran
Manajemen guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih dan memberhentikan kepala sekolah 2. Memilih dan memberhentikan guru 3. Menentukan gaji guru 4. Memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru 5. Menentukan dan memberikan pelatihan kepada guru
Struktur dan perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka atau menutup sekolah 2. Menentukan program yang ditawarkan sekolah 3. Definisi dari isi mata pelajaran 4. Pengawasan atas kinerja sekolah
Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan sekolah 2. Alokasi anggaran guru dan tenaga administrasi (personal) 3. Alokasi anggaran nonpersonal 4. Alokasi anggaran untuk pelatihan guru

Sumber: (Burki, Shahid J, Guillermo E. Perry and William R. Dillinger, 1999, *Beyond the Center: Decentralizing the state*, The World Bank, Washington, DC)

2.4 Angka Partisipasi Sekolah

Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echols dkk, 2000). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil

pembangunan (Sumaryadi, 2010) Indikator yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah.

(Tilaar, 2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sundariningrum (dalam Sugiyah 2001) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. (Cohen dan Uphoff, 1980) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:
 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
 2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
 3. Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan
 4. Partisipasi dalam evaluasi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai persentase anak yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan tanpa memperhatikan jenjang atau tingkat pendidikan yang sedang dijalaninya (BPS, 2013:43). Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan. Angka partisipasi sekolah (APS) ialah persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk umur tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor

pendidikan, seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung oleh setiap jenjang sekolah (BPS, 2015).

Angka partisipasi sekolah muncul dianggap sebagai tolok ukur kinerja layanan pendidikan berdasarkan pasal 31 UUD 1945 (<http://definienda.blogspot.co.id/2015/03/angkapartisipasisekolahaps.html>) yang berbunyi. (1) Ayat 1, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Ayat 2, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Ayat 4, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Ayat 5, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar dan pedoman pendidikan diturunkan pada konsep pendidikan yang ada di Indonesia seperti di bawah ini konsep pendidikan menurut ahli:

2.4.1 Konsep Pendidikan

Menurut Teguh Triwiyanto (2014: 19) bahwa dalam mengkaji hakikat pendidikan akan memberikan landasan yang kuat terhadap praktik pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia. Hakikat pendidikan menjadikan arah pendidikan menjadi kokoh dan kuat untuk memuliakan manusia. Upaya dalam praktik pendidikan perlu mendasarkan diri pada hakikat pendidikan sebagai tiang penyangganya. Hakikat pendidikan adalah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal dan nasional.

Menurut (Triwiyanto, 2014) menjelaskan konsep dasar mengenai pendidikan banyak diberikan oleh para ahli. Konsep-konsep tersebut saling melengkapi dan menambah kekayaan pemikiran mengenai pendidikan. Disiplin ilmu biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi dan lainnya ikut memberikan sumbangan dan memperbaiki teori-teori pendidikan yang ada. istilah pendidikan, ada beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Batasan tersebut antara lain:

1. Pendidikan sebagai transformasi budaya
2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi
3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara
4. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja

Berdasarkan pengertian dan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara sehat. Menurut (Triwiyanto, 2014) menjelaskan unsur-unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Tujuan pendidikan
2. Kurikulum
3. Peserta didik

2.4.2 Jenjang Pendidikan

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 yang dimaksud dengan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan terdiri

atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan Doktor).

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (Pasal 13). Warga negara yang berumur enam tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, sedangkan yang berumur tujuh tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 14). Pendidikan dasar merupakan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau satuan pendidikan yang sederajat (Pasal 15).

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

2.4.3 Jenis-Jenis Pendidikan

Pendidikan pada di negara ini pada umumnya memiliki tiga jenis pendidikan di Indonesia, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal yaitu:

1. Pendidikan Formal

Adalah pendidikan yang memiliki jenjang dan terstruktur, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan sekolah dasar (SD), pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), pendidikan sekolah menengah atas (SMA), dan pendidikan tinggi (Universitas). Satuan penyelenggara pendidikan tersebut seperti Taman Kanak-kanak (TK) Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Perguruan Tinggi, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.

2. Pendidikan Informal

Adalah Pendidikan yang berasal dari lingkungan dan keluarga dimana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Seperti Agama, Budi pekerti, Etika, Sopan santun, Moral, Sosialisasi. Sementara menurut Axin dalam (Suprijanto, 2009), pendidikan informal adalah pendidikan dimana warga belajar tidak sengaja belajar dan pembelajaran tidak sengaja. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Pendidikan informal adalah pendidikan yang bisa terjadi dimana pun dan proses berlangsung

tidak sengaja. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan informal adalah suatu jalur pendidikan keluarga atau lingkungan yang berupa kegiatan belajar yang dilakukan secara mandiri dan dikerjakan secara sadar dan bertanggung jawab. untuk membantu warga belajar.

3. Pendidikan Non Formal

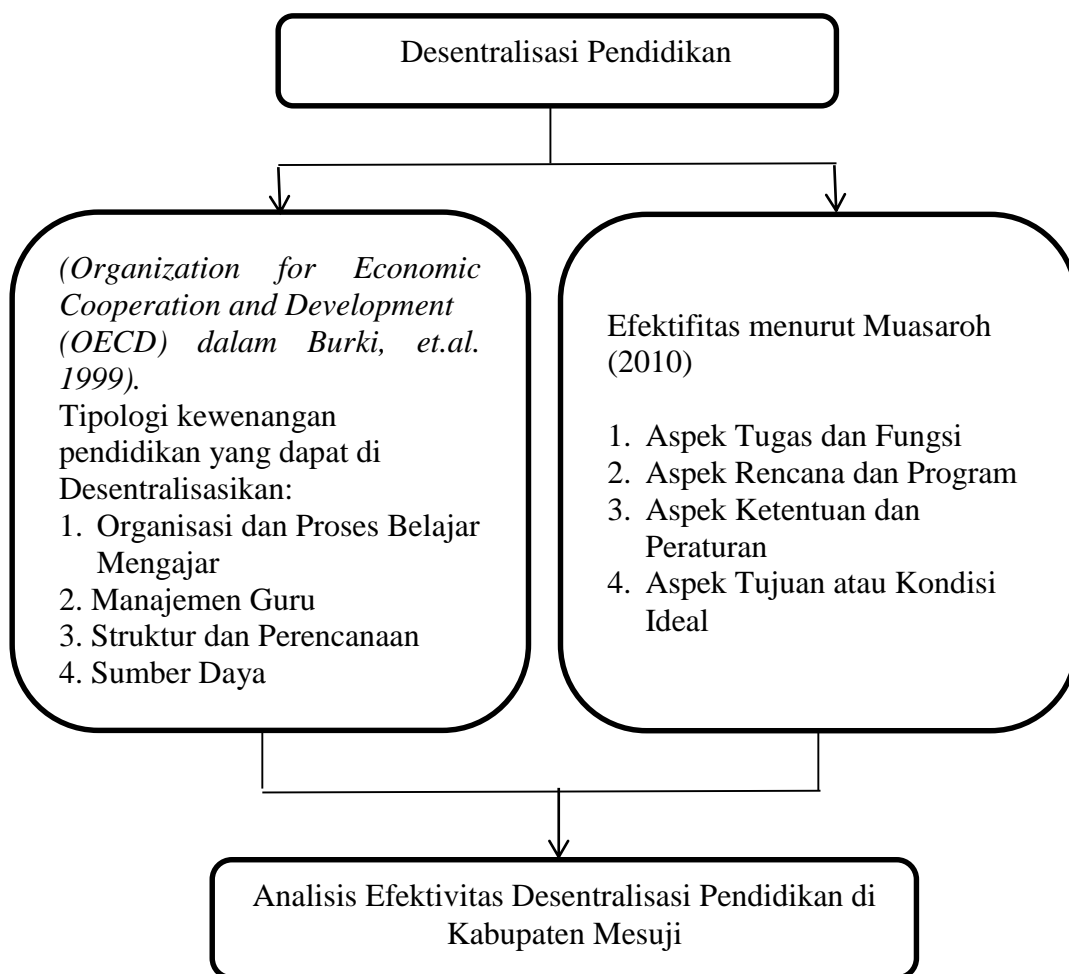
Adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non formal yaitu: Kelompok bermain (KB), Taman penitipan anak (TPA), Lembaga kursus, Sanggar, Lembaga pelatihan, Kelompok belajar, Pusat kegiatan belajar masyarakat, Majelis taklim

2.5 Kerangka Pikir

Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah dalam menentukan berbagai kebijakan, seperti organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber pendanaan sekolah. Pada pelaksanaannya pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang kompleks dan dapat membawa perubahan-perubahan penting tentang cara sistem pendidikan menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, dan mengelola sekolah-sekolah. Pendidikan sangat penting bagi pembangunan ekonomi, dan sistem persekolahan merupakan wahana untuk memperkuat pengaruh-pengaruh politik serta menjalankan program dan tujuan para penguasa. Sukses atau gagalnya upaya desentralisasi persekolahan sering kali lebih ditentukan oleh alasan-alasan politis dari pada rancangan teknis. Program-program desentralisasi sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Peneliti tertarik meneliti efektivitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji menggunakan teori efektivitas menurut (Muasaroh, 2010) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu *pertama* tugas dan fungsi. *kedua* aspek rencana dan program *Ketiga* aspek ketentuan dan peraturan *keempat* tujuan dan kondisi ideal dan tipologi kewenangan yang dapat di desentralisasikan melalui empat komponennya *pertama* komponen organisasi dan proses belajar mengajar *kedua* manajemen guru *ketiga* struktur dan perencanaan dan *keempat* sumber daya . untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



Melalui kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa desentralisasi pendidikan dapat dilihat melalui aspek efektivitas sebagai alat ukur mengenai keluaran yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran tidak terwujud yang tidak mudah untuk di kuantifikasi. Sedangkan pada aspek mengenai tipologi kewenangan yang dapat didesentralisasikan sebagai alat untuk mengukur faktor eksternal dan internal daerah guna mendapatkan gambaran mengenai kelayakan tipologi kewenangan yang dapat di desentralisasikan untuk di terapkan di Kabupaten Mesuji. Analisis peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji untuk mendalami dan mengkajian penelitian agar lebih spesifik terkait desentralisasi pendidikan.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut (Creswell, 2016) adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

Tujuan penelitian deskriptif menurut (Nazir, 2003), adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menganalisis, menemukan, memahami dan menjelaskan tentang Efektivitas dan kelayakan desentralisasi pemerintah pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mesuji dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk mempertajam dan memberikan batasan arahan suatu penelitian. Fokus penelitian diperlukan karena memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data guna memilih

data yang relevan dan data yang tidak relevan, sehingga dengan batasan ini peneliti lebih terfokus dalam memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. penelitian ini berfokus pada efektivitas menurut (Muasaroh, 2010) yang membagi aspek efektivitas menjadi empat bagian yaitu:

a. Aspek Tugas atau Fungsi

Yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektivitas jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Aspek Rencana atau Program

Yaitu kemampuan menggagas secara tepat dan menciptakan peluang demi mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Yaitu mampu menjalankan aturan dengan baik yang berhubungan dengan kegiatan secara berkelanjutan.

d. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Yaitu kegiatan dikatakan efektif apabila dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

Selain berfokus pada keempat aspek efektivitas, Fokus penelitian ini peneliti menfokuskan pada jenis desentralisasi pendidikan, yaitu *pertama* Desentralisasi bertumpu pada pemerintah daerah. *kedua* Desentralisasi pendidikan yang bertumpu pada sekolah. Melalui tipologi kewenangan pendidikan yang dapat di desentralisasikan yaitu.

a. Organisasi dan Proses Belajar Mengajar

Merupakan tindakan peningkatan pemahaman dan pengetahuan dan proses mengembangkan kemampuan yang dilakukan secara terus menerus oleh organisasi.

b. Manajemen Guru

Proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru melalui rangkaian kegiatan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

c. Struktur dan Perencanaan

Yaitu susunan rencana berupa aktifitas dalam menggerakkan program yang berkaitan dengan pendidikan berupa mata pelajaran dan sekolah.

d. Sumber Daya

Merupakan nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan baik sumber daya fisik maupun non fisik.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2011). Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Mesuji. Peneliti memilih Kabupaten Mesuji karena partisipasi masyarakat untuk sekolah di pendidikan dasar paling rendah di Provinsi Lampung dijelaskan pada tabel 1.1 untuk tingkatan Sekolah Dasar (SD) 99,26% dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 89,36%. Unit penelitian yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, unit sekolah dan masyarakat. peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang melakukan penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan guna mendorong partisipasi masyarakat untuk mengikuti wajib belajar sesuai program pemerintah dan dinas ini memegang peranan yang sangat vital dalam regulasi pendidikan di Kabupaten Mesuji kemudian sekolah sebagai unit pelaksana pembelajaran serta masyarakat sebagai objek dari penerapan program pemerintah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Husein (Umar, 2014) secara umum data diartikan sebagai suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Sedangkan menurut Soeratno dan Arsyad (dalam Koestoro Basrowi, 2006: 138) data adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat

untuk suatu keperluan tertentu. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

(Sugiyono, 2012) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan dalam Meningkatkan Partisipasi pendidikan dasar studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.

3.5 Informan

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang efektivitas desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji. Dalam menentukan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan teknik ini didapati informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi. Tentang teknik *purposive sampling*, (Usman dan Akbar, 2009) menjelaskan pemilihan sampel *purposive* (bertujuan) atau yang lazim disebut *judgement sampling* merupakan pemilihan siapa subjek yang ada di dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri

dan kriteria khusus yang dimiliki sampel tersebut atas pemahaman yang kuat terhadap objek yang akan diteliti.

Menurut (Faisal, 1990) agar dapat memperoleh informasi lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- a. Subjek yang lama dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian
- b. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian
- c. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.
- d. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang mengetahui kejadian tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan beberapa kelompok informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andi S. Nugraha, S.H.,M.H	Kepala Dinas
2	Yoga Puja Rama WP, S.Psi.,M.M	Sekretaris Dinas
3	M. Hafiz S, S.IP	Kepala Bidang Pendidikan Dasar
4	Anwar Darwin S.Sos	Kepsek SMPN 1 Satap Rwj Utara
5	Warno S.Pd	Kepsek SMPN 17 Mesuji
6	Sahrizal S.Pd.SD	Kepsek SDN 11 Rwj Utara
7	Rusdiwan S.Pd	Kepsek SDN 4 Simpang Pematang
8	Ahmad Irsan	Masyarakat
9	Agus Hidayat	Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan. Penelitian ini, melakukan wawancara secara langsung untuk

memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar wawancara terarah dan tidak menyimpang (Silaen dan Widiyono, 2013).

2. Observasi

Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam observasi ke lapangan peneliti dapat melakukan pencatatan tentang gambaran apa yang sudah diamati di lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati hal-hal yang tidak didapatkan ketika proses wawancara sedang berlangsung. Dengan menggunakan observasi peneliti dapat langsung mengamati data-data diluar wawancara sebagai penunjang data primer untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti melihat dan mengamati kinerja pegawai yang sedang melakukan pelayanan terhadap korban yang melapor langsung ke dinas. Peneliti mengamati program, anggaran, dan prosedur yang dilakukan dinas sudah berjalan dengan baik atau tidak.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam teknik penelitian ini adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti contohnya Profil, Laki, dan Renstra agar sumber data dapat dimanfaatkan. Dokumentasi digunakan untuk penunjang serta melengkapi data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Penulis menggunakan studi dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang riil bahwa penulis telah benar-benar melakukan penelitian ke lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai acuan penulis berupa fenomena yang diabadikan untuk jangka waktu yang lama.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Peneliti memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian dengan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses ini peneliti lakukan dengan memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kata-kata yang tidak baku dan diluar konteks peneliti pilih dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

2. Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Hasil wawancara biasanya masih mengandung makna yang ambigu atau sulit untuk dijelaskan. Sehingga peneliti memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini

menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:7), yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan. Peneliti mengumpulkan data mengenai sosialisasi dan perlindungan anak korban kekerasan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan data yang diperoleh yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti menyajikan data yang di peroleh dari penelitian yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti menyajikan data yang telah direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. (Moloeng, 2004) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber karena untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keselarasan antara data yang didapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara diperkuat oleh data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mesuji

4.1.1 Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Mesuji terletak pada kordinat 4.0439⁰S 105.4013⁰E. Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

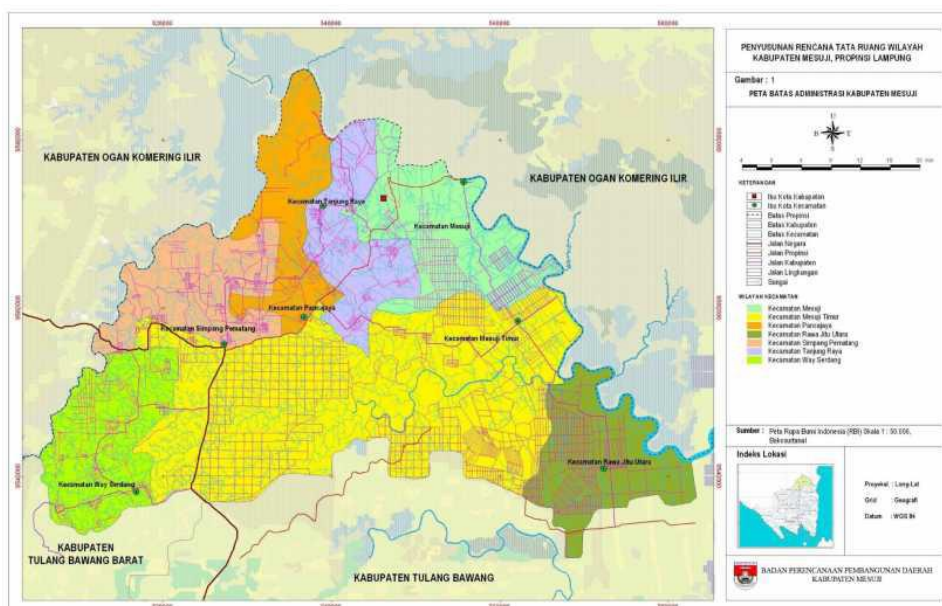
Sebelah Timur : Perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelah Selatan : Perbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sebelah Barat : Perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008, dibentuk Kabupaten Mesuji dengan Ibukota Pemerintahan di Sidomulyo (Wiralaga Mulya). Pembentukan Kabupaten Mesuji merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 7 kecamatan dan 75 desa dengan memiliki luas wilayah 2.184,00 km². Untuk mengetahui letak dan batas wilayah administrasi Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan cakupan serta luas wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Mesuji



Tabel 4.1
Cakupan dan Luas Wilayah Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Ibukota	Desa	Luas (km)
1	Mesuji	Wiralaga	11	274,73
2	Tanjung Raya	Brabasan	21	238,07
3	Rawajitu Utara	Panggung Jaya	13	229,25
4	Mesuji Timur	Tanjung Mas Makmur	20	810,20
5	Simpang Pematang	Simpang Pematang	13	139,61
6	Way Serdang	Bukoposo	20	294,42
7	Panca Jaya	Adi Luhur	7	197,72
Total			105	2.184,00

Sumber: *BPS Kabupaten Mesuji Tahun 2020*

4.1.2 Penduduk

Penduduk merupakan faktor utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat didukung oleh tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan pembangunan tersebut. Penduduk dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Aspek penduduk yang menjadi bahasan antara lain jumlah penduduk,

perkembangan penduduk, penyebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan struktur penduduk. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji dipengaruhi oleh pertumbuhan alami (lahir dan mati), penduduk datang dan penduduk keluar (migrasi). Berdasarkan data penduduk Kabupaten Mesuji pada proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 200.198 jiwa yang terdiri atas 104.606 jiwa penduduk laki-laki dan 95.592 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah registrasi penduduk Mesuji 2019 ada sebanyak 230.373 jiwa.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin berdasarkan hasil proyeksi tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 109,43. Kepadatan penduduk di Kabupaten Mesuji tahun 2019 berdasarkan hasil registrasi mencapai 106 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk hasil proyeksi mencapai 92 jiwa/ km². Kepadatan Penduduk di tujuh kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Panca Jaya yang mencapai 192 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Mesuji Timur dengan kepadatan penduduk 55 jiwa/km².

Catatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi bahwa penduduk dari tahun 2008 sampai tahun 2010 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2008 diketahui sebanyak 195.049 jiwa, tahun 2009 berjumlah sebanyak 198.091 jiwa, dan tahun 2010 sementara berjumlah 187.407 jiwa, dengan demikian terjadi pertambahan jumlah penduduk selama kurun waktu 2008-2009 rata-rata LPP sebesar 23.72 % dan kurun waktu 2009-2010 rata-rata LPP sebesar 17.93 %.waktu 2010-2011 rata-rata LPP sebesar 17.93 %. Lebih jelas mengenai jumlah perkembangan penduduk wilayah Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Mesuji bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Mesuji pada tahun 2016 berjumlah

sebanyak 196.913 jiwa, meliputi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 102.873 jiwa dan perempuan berjumlah 94.040 jiwa. Ditinjau dari umur, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Mesuji diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah 196.913 jiwa.

4.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar pedoman di bidang pendidikan umum dan pendidikan luar sekolah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis/operasional pendidikan umum dan pendidikan luar sekolah sesuai standar, prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap peningkatan kemampuan dan potensi pendidikan usia dini, pendidikan taman kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah/Kejuruan dan pendidikan Luar Sekolah;
- e. pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tenaga pendidik dan kependidikan;
- f. pembinaan dan pengembangan aparatur pendidikan dasar, Pendidikan Menengah / Kejuruan, Pendidikan Luar sekolah pendidikan;
- g. penyelenggaraan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kurikulum, sarana prasarana tenaga pendidik dan kependidikan;
- h. perumusan, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pendidikan;

- i. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan Menengah / Kejuruan, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Non Formal, Pembinaan guru dan siswa berbakat;
- j. Pengembangan Teknologi dibidang Pendidikan;
- k. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
- l. penyelenggaraan pengendalian, mutu Pendidikan, Penyelenggaraan Pelayanan di bidang pendidikan dan Pelayanan Administratif;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- n. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, keurbakalaan, kesejarahan dan nilai tradisional;
- o. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang sejarah, tradisi dan keurbakalaan;
- p. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang informasi kebudayaan, bimbingan dan penyuluhan;
- q. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kebudayaan, kesenian, keurbakalaan, kesejarahandan nilai tradisional;
- r. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang sejarah, tradisi dan keurbakalaan; dan
- s. membantu, koordinasi, fasilitasi dan monitoring kebijakan teknis bidang informasi kebudayaan, bimbingan dan penyuluhan.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji
- b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) membawahi :
 - 1) Seksi Sekolah Dasar (SD);

- 2) Seksi Sekolah Menengah (SMP);
- d. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahi:
 - 1) Seksi Kelembagaan PAUD dan TK;
 - 2) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat;
- e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi
 - 1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - 2) Seksi Kurikulum;
- f. Bidang Kebudayaan, membawahi
 - 1) Seksi Seni dan Budaya;
 - 2) Seksi Kepurbakalaan, Kesejarahan dan Nilai Tradisional;
- g. Unit Pelayanan Teknis;
- h. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian keterampilannya.

4.2.1 Visi dan Misi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji dalam mengakomodasi dinamika dan aspirasi yang berkembang telah menetapkan Visi Dinas tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Mesuji yang Sejahtera, Aman dan Berkeadilan”. kemudian misinya adalah “Mewujudkan masyarakat yang sehat, agamais berbudaya unggul dan berdaya saing”.

4.2.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi

4.2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji memaparkan beberapa tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Mesuji adalah mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4.2.2.2 Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan pada tahun 2020. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai sumber dana yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstranya. Adapun sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020 adalah:

1. Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan.
2. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah

4.2.2.3 Strategi Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji adalah:

1. Memberikan subsidi pendidikan bagi siswa, sekolah dan tenaga pendidik
2. Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan searah nilai-nilai lokal
3. Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan.

Sedangkan untuk arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut :

1. Memberikan subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak mampu atau berprestasi dan subsidi pendidikan bagi sekolah dan tenaga pendidik.

2. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik

Tabel. 4.2

Visi Misi dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji

Visi: Terwujudnya Mesuji yang Sejahtera, Aman dan Berkeadilan		
Misi: Mewujudkan masyarakat yang sehat, agamis berbudaya unggul dan berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APK PAUD/TK 2. APM PAUD/TK 3. APS PAUD 4. APK SD 5. APM SD 6. APS SD 7. Angka putus sekolah (APTS) SD 8. Angka kelulusan SD 9. Angka melanjutkan SD ke SMP 10. Rasio siswa SMP terhadap jumlah RKB 11. APK SMP 12. APM SMP 13. APS SMP 14. Angka putus sekolah (APTS) SMP 15. Angka kelulusan SMP 16. Angka kelulusan paket A 17. Angka kelulusan paket B 18. Angka kelulusan paket C 19. Jumlah lembaga penyelenggara Paket A,B dan C yang dibina 8 20. Persentase pendidik yang berkualifikasi S1/D4 bagi pendidik SD 21. Persentase pendidik yang berkualifikasi S1/D4 bagi pendidik SMP 22. Persentase pendidik yang bersertifikasi bagi SD dan SMP 23. Persentase pendidik yang bersertifikasi bagi SD dan SMP

		24. Persentase Jumlah SMP yang terakreditasi 25. Persentase Ketersediaan data pendidikan secara berkelanjutan
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan	1. Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina 2. Jumlah jenis seni dan budaya yang di kelola 3. Jumlah event seni dan budaya yang dikelola

Tabel 4.3
Jumlah Lembaga Pendidikan di Kabuapten Mesuji Tahun 2021

No	Kecamatan	TK PAUD		SD		SMP		PKBM
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Swasta
1	Tanjung Raya	4	36	21	3	6	4	3
2	Mesuji	6	13	15	1	5	2	1
3	Mesuji Timur	5	19	23	0	5	3	1
4	Panca Jaya	1	17	11	0	3	0	2
5	Rawajitu Utara	2	22	15	1	3	3	1
6	S. Pematang	5	17	14	2	4	3	1
7	Way Serdang	9	23	28	1	7	5	1
Jumlah		32	147	127	8	33	20	10
Jumlah Total		377						

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji Tahun 2021

Tabel. 4.4
Jumlah Guru di Kabuapten Mesuji Tahun 2021

No	Kecamatan	SD	SMP	TK/PAUD	PKBM
1	Tanjung Raya	312	120	47	2
2	Mesuji	159	65	28	0
3	Mesuji Timur	237	83	61	0
4	Panca Jaya	112	48	27	0
5	Rawajitu Utara	186	47	49	0
6	Simpang Pematang	191	95	56	2
7	Way Serdang	303	138	74	0
Jumlah		1.500	596	342	4
Jumlah Total					2.442

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji Tahun 2021

Tabel. 4.5
Jumlah Murid di Kabuapten Mesuji Tahun 2021

No	Kecamatan	SD	SMP	TK/PAUD	PKBM
1	Tanjung Raya	5242	1624	819	214
2	Mesuji	2443	784	359	181
3	Mesuji Timur	3586	1042	792	189
4	Panca Jaya	2097	593	465	560
5	Rawajitu Utara	2495	487	710	50
6	Simpang Pematang	3611	1195	661	32
7	Way Serdang	4884	1920	1145	142
Jumlah		24.358	7.645	4.951	1.368
Total Murid					38.322

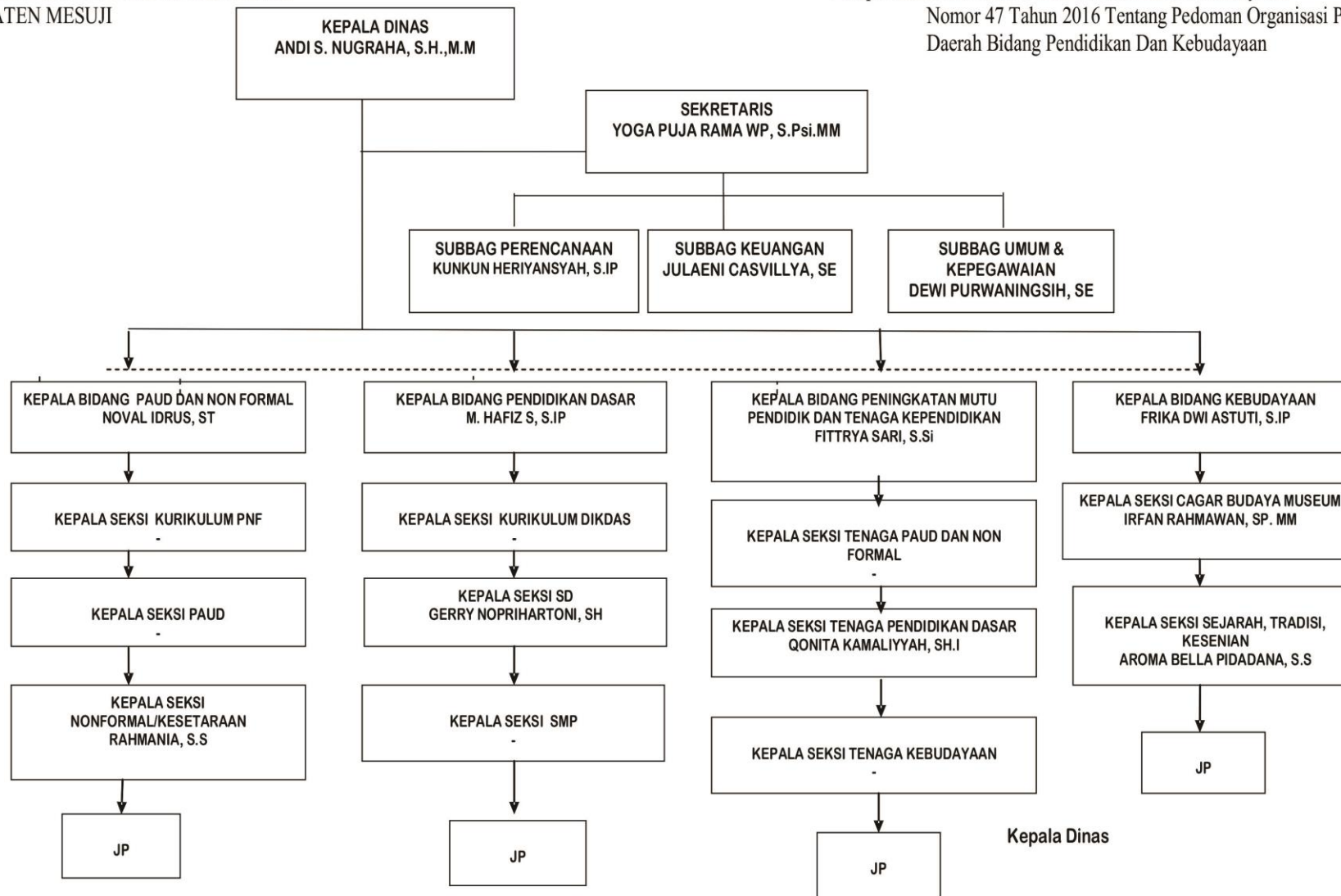
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji Tahun 2021

4.2.3 Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji

Dalam Pelaksanaan tanggung jawab kegiatan sehari-hari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji dibagi dalam beberapa bagian tugas untuk mempermudah pelaksanaan tugas fungsional dibagi kedalam beberapa bidang. Adapun susunan struktur organisasi terdiri dari:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MESUJI

Lampiran : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan



Kepala Dinas

ANDI S. NUGRAHA, S.H.,M.M
NIP. 19830608 201001 1 023

4.2.4 Sumber Daya Manusia

Pada konteks ini dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji pada tahun 2020 didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 28 orang yang terdiri dari 14 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 14 orang Tenaga Sukarela (TKS). Secara struktural, formasi jabatan di Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas Eselon II berjumlah 1 (satu) orang, Eselon III berjumlah 4 (empat) orang, dan jabatan Eselon IV berjumlah 3 (tiga) orang. Sampai saat ini formasi eselon IV yang belum terisi sebanyak 5 (lima) formasi. Sumber daya manusia Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji secara rinci disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji

No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan				
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	TKS
1	II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	III	1	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-
3	IV	2	8	-	-	-	-	-	10	-	-	-
Jumlah		4	11	-	-	-	-	1	14	-	-	-
4	Non Eselon	-	4	5	-	-	-	-	5	4	-	-
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TKS	-	10	2	11	-	-	-	-	-	-	23
Total		4	25	7	11	-	-	1	19	4	-	23

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji 2020*

4.2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas baik merupakan faktor yang cukup penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji hingga 13 Agustus 2021 meliputi:

- a. Kantor/gedung : 1 unit
- b. Kendaraan Dinas Roda 4 : 2 unit
- c. Kendaraan Dinas Roda 2 : 1 unit
- d. Truk Sekolah : 7 unit
- e. Sarana Kantor Lainnya : 30 jenis dengan jumlah yang beragam.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti membuat simpulan terkait efektifitas kelayakan desentralisasi pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kelayakan cenderung lemah pada aspek rencana dan program karena banyak program yang tidak di realisasikan dan aspek tujuan dan kondisi ideal kualifikasi tenaga pendidikan masih banyak beralatar belakang lulusan SMA dan masyarakat yang tidak memiliki ijazah 21,10%. Pada aspek tipologi kewenangan yang di desentralisasikan komponen manajemen guru masih minim kegiatan peningkatan kapasitas, struktur dan perencanaan tidak memiliki rencana khusus pada unit sekolah terkait pendidikan serta sumber daya pemanfaatan bantuan operasional tidak mendorong minat masyarakat untuk sekolah.

Pada tipologi kewenangan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Mesuji tingkat kelayakan melalui komponen manajemen guru lemah karena masih banyak guru yang berlatarbelakang lulusan sekolah menengah atas dan belum terdaftar dan memiliki NUPTK. Selain itu sumber daya juga menjadi persoalan pada tingkatan gaji honorer guru masih sangat minim, dan masyarakat masih menilai pendidikan belum menjadi alternatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Maka tipologi kewenangan pendidikan yang dapat di desentralisasikan di Kabupaten Mesuji sepenuhnya belum layak untuk di terapkan pada tingkatan pendidikan dasar.

B. Saran

Melalui pemaparan tersebut untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mesuji perlu ada saran dalam upaya mendorong percepatan partisipasi sekolah yaitu:

1. Realisasi aturan turunan dari Undang-Undang maupun Permendikbud terkait penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah. Untuk meretas persoalan pendidikan khususnya di Kabupaten Mesuji
2. Standarisasi tenaga pendidik ditingkat sekolah dasar dan sekolah menengah atas pada Strata 1 (satu).
3. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji menitikberatkan pada peningkatan SDM dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ace, Suryadi dan Dasim B. 2004. *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. PT Genesindo, Bandung.
- Akbar, Husaini Usman & Purnomo Setiadi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahrul Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Cohen & Uphoff. 1977. *Partisipasi Pembangunan Pedesaan*. Cornel. Universitas. New York.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Djumali dkk. 2014. *Landasan Pendidikan*. Yogyakarta : Gava Media
- Echols, John M. 1988. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gedeian. G. Arthur dkk. 1991. *Organization Theory and Design*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Juli, Panglima, Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kaho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kurniawan, Syamsul. 2013. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: ARR-RUZZ MEDIA
- Kurniawan, Beni. 2012. *Metode Penelitian Ilmiah*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Muasaroh. 2010. “Aspek-aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program PNPM-MP. Universitas Brawijaya Malang.
- Moloeng, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari dan Martini. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Rajawali Press. Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Patrinos, Harry A. and David L. Ariasingam, 1997. *Decentralization of Education: Demand-Side Financing, The World Bank: Directions in Development, Washington, D.C.*
- Siswanaftar pustaka pembayaran pajak e-billingto, Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung.
- Sumaryadi, 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sundariningrum, 2001. *Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Tilaar, 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Triwiyanto, Teguh. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber Lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2020

Jurnal dan Makalah :

Dreher, A. (2006). *Does Globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization. Applied economics*, 38 (10), 1091-1110.

Ervannudin, Nur & W.Wahyu. Bimo. 2016. *Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas*. Vol. 10 No.1.

Maulida, Ayu. *Desentralisasi Pendidikan*. Universitas Negeri Padang. Hal 9

Murdiansyah, Herman. 2018. *Pengaruh Perilaku dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan*. Vol. 3 No. 2 November 2018.

Nugroho, Riant. 2018. *Kebijakan Pendidikan yang unggul, kasus pembangunan pendidikan di Kabupaten Jembrana*. No. 17.Hlm.

Sjamsi, Pasandaran. 2017. *Desentralisasi Pendidikan dan masalah pemberdayaan sekolah*. dalam kelola Vol.1. No.34. Hlm.

Subijanto. 2018. *Prinsip-prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan*. No. 11. Hlm

Utomo, Saddian. 2008. *Penanganan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik*. *Jurnal ilmu administrasi dan organisasi*. Volume 15, Nomor 3 Sep-Des 2008. P:161-167.

Widodo, Wahyu, Bimo dan Ervannudin, Nur. 2016. *Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas*. No. 7-8. Hlm.

Web:

<https://lampung.bps.go.id/>

<https://mesujikab.bps.go.id/>

<https://ipm.bps.go.id/data/kabkot/metode/baru/1881>